

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika dalam lingkungan strategis akan menjadi hal yang paling diperhatikan di dalam eksistensi pada sebuah negara. Hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat pengaruh dari ranah global, regional, sampai Internasional. Akan tetapi, dinamika pada pasca perang dingin mengalami pergeseran paradigma mengenai keamanan dari yang semulanya keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional. Meski demikian, pergeseran tersebut tidak mengubah apa pun mengenai ancaman yang terus berdatangan dan dipersepsikan. Bagi Indonesia, pengembangan pertahanan laut adalah suatu keharusan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang didominasi oleh lautan dan proyeksi pembangunan nasional yang difokuskan pada Poros Maritim Dunia.

Mengenai pertahanan dan keamanan, maka tidak terlepas dari ancaman yang kemudian diperlukan beberapa prasarat, salah satunya Daya Tangkal. Berkaca dari doktrin pertahanan Indonesia, yaitu Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), maka pada dasarnya membangun kekuatan untuk menghasilkan Daya Tangkal tersebut tidak dapat diemban kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja, melainkan harus menjalankan prinsip inklusif dari beberapa aktor di Indonesia. Kebijakan menjadi jalan tempuh untuk menerapkan ini.

Di saat bersamaan, terdapat urgensi pengelolaan postur pertahanan yang dikhususkan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Urgensi tersebut disematkan dalam narasi pembentukan TNI AL yang profesional dan modern. Profesional sendiri mengacu pada personel TNI AL yang dilatih, dididik, dilengkapi, dan diperhatikan kesejahteraannya. Sementara modern diartikan sebagai personel yang dilengkapi dengan alutsista yang mampu berhadapan dengan ancaman kontemporer dan

memiliki empat karakter kekuatan angkatan laut, yaitu *ready, flexible, mobile, sustained*.

Pada tahun 1998, terjadi Reformasi politik pemerintahan di Indonesia dan agenda di dalamnya berpengaruh bagi tubuh organisasi TNI (yang semulanya ABRI). Tentu, hal ini berdampak pula pada matra AL terkhususnya pada bidang pertahanan dan keamanan di laut seperti reorganisasi dan juga validasi armada yang tersusun oleh beberapa *flotilla* kapal perang yang kemudian disesuaikan dengan kesamaan fungsinya.

Dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang wilayahnya terbentang pada posisi silang diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga, Indonesia memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan wilayah lautnya mulai dari mengatur alur pelayarannya hingga menjaga kedaulatan di seluruh wilayah laut Indonesia. Bagaimanapun juga bahwa Indonesia pasti selalu terikat terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Hukum ini menjamin wilayah laut Indonesia khususnya *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Trade* (SLOT). SLOC dan SLOT merupakan nadi yang penting bagi Indonesia dimana secara geografis berada di wilayah Asia Tenggara sehingga merupakan sesuatu yang sangat vital bagi perdagangan internasional (Supandi, 2015). Untuk itu dibutuhkan kesamaan persepsi terhadap keamanan laut. Segala cara dan upaya dilakukan untuk menjamin stabilitas perdamaian dan keamanan di wilayah laut Indonesia.

Posisi *center of gravity* kawasan asia pasifik yang dimiliki Indonesia membuat tingkat keamanan menurun (Yanti, 2014). Posisi ini dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Timur bergantung pada perairan yang berada di daerah Asia Timur. Meningkatnya lalu lintas laut membuat tugas dari pengawasan sangat berat karena tidak hanya berhubungan dengan perlindungan laut serta lalu lintas tetapi juga terhadap pembajakan. Menurut Laporan

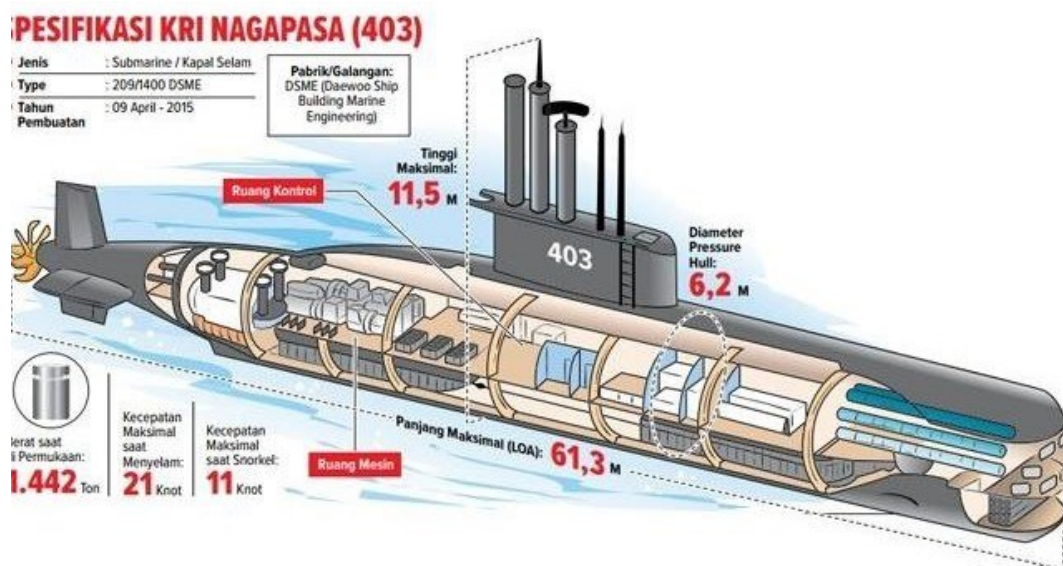
International Maritime Organization (IMO) pada tahun 2015 menyebutkan bahwa di daerah perairan Asia terjadi pembajakan sebesar 90,40%, perairan Asia Tenggara sebesar 22% dan 14% berada di perairan Cina Selatan (Sobaruddin et al., 2017).

Konstelasi geografi Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas dan negara kepulauan, berimplikasi terhadap munculnya tantangan geopolitik dan geostrategi. Laut Cina Selatan (LCS) adalah merupakan wilayah yang sangat vital bagi Pemerintah Indonesia hal ini dikarenakan di kawasan tersebut banyak instrumen serta spektrum realistik, seperti kedaulatan negara, ekonomi, politik, dan militer. Dalam hal kedaulatan, terdapat beberapa negara yang mengklaim teritorialnya di LCS. Dari segi politik, LCS akan selalu menjadi objek kebijakan strategis negara terkait untuk mampu mempengaruhi dinamika kawasan. Selain itu, militer akan memainkan urusan dominasi pertahanan dan kedaulatan negara yang pasti akan sering terjadi gesekan antar negara berbagai pihak. Permasalahan geopolitik yang terjadi di Indonesia yaitu pengakuan Cina atas Kepulauan Spratly yang masih dalam status sengketa antara Filipina dan Vietnam. Posisi Pulau ini sangat strategis dan memberikan banyak keuntungan baik dari aspek politik, ekonomi, dan pertahanan. Mengenai pertahanan dan keamanan, maka tidak terlepas dari ancaman yang kemudian diperlukan beberapa prasarat, salah satunya adalah Daya Tangkal. Berkaca dari doktrin pertahanan Indonesia, yaitu Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), maka pada dasarnya membangun kekuatan untuk menghasilkan Daya Tangkal tersebut tidak dapat diemban kepada TNI saja, melainkan harus menjalankan prinsip inklusif dari beberapa aktor di Indonesia. Kebijakan menjadi jalan tempuh untuk menerapkan ini.

Indonesia bukanlah suatu negara yang bersengketa langsung di LCS, akan tetapi bila dihadapkan pada permainan besar serta tantangan yang ada dalam mempertahankan di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan LCS. Maka kondisi ini secara tidak langsung menarik Indonesia kedalam arena

peperangan hibrida. Permasalahan di laut Indonesia yang sering terjadi di wilayah Laut Natuna yaitu dimana kapal *Coast Guard* dari Cina seringkali melakukan pelanggaran terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen. Permasalahan lainnya yaitu mengenai batas laut RI dengan Australia. Status hukum batas laut antara Indonesia dan Australia belum diratifikasi atau disahkan. Kedua negara telah melakukan penetapan batas zona ekonomi eksklusif tetapi belum menentukan konsekuensi atas pelanggarannya.

Persaingan klaim teritorial di Laut Cina Selatan telah menyebabkan konflik secara berulang antara Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Kapal selam konvensional jenis diesel elektrik dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Australia yang secara kemampuan memang lebih kecil dan lebih dari pada kapal selam bertenaga nuklir yang dimiliki Angkatan Laut AS (*US Navy*) (Andersson, J. J.2015).



Gambar 1. 1 Kapal Selam

Sumber: https://cdn-asset.com/wp-content/uploads/2017/08/kapal-selam-baru-milik-indonesia_m_153597-640x421.jpeg

Kapal selam adalah sebuah platform yang sangat diperlukan baik dalam pencegahan secara taktis ataupun strategis bagi Angkatan Laut dimanapun. Karakteristik Kapal selam yang dapat memberikan keunggulan-keunggulan dengan kemampuan perang yang handal dengan teknologi canggih tanpa terdeteksi. Sebagian besar Angkatan Laut di dunia pasti memiliki dan mengoperasikan kapal selam walaupun secara kemampuan, jumlah dan populasinya masing-masing negara berbeda dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan Negara tersebut. Sebuah kapal selam ada yang mampu menyelam hingga ke dasar laut dan tetap selalu berada di bawah permukaan air laut hingga waktu berbulan-bulan lamanya. Hal ini dikarenakan pengaruh teknologi secara umum yang terletak pada desain khas pada dinding yang rangkap untuk kapal selam tersebut. Ruang khusus yang kedap terhadap air (atau tangki pemberat) antara dinding luar dan dinding dalam juga dapat diisi dengan air laut, sehingga meningkatkan bobot pada keseluruhan kapal serta akan mengurangi kemampuan mengapung kapal selam tersebut. Dengan dorongan oleh *propeller* ke arah depan serta pengarahannya pada bilah kemudi datar ke bawah, sehingga kapal selam tersebut akan dapat melakukan penyelaman ke bawah air.

Teknologi kapal selam yang modern dapat selalu mendukung pada tujuan perang laut yang selalu harus disempurnakan, manfaat dari otomatisasi dan perkembangan teknologi dalam kapal selam dapat mengarah kepada peningkatan kemampuan dengan berkurangnya pengawak serta pemeliharaan sekaligus dapat mengontrol keterjangkauan baik dalam jangka pendek ataupun panjang.

Sistem pendorongan pada kapal selam dapat menggunakan berbagai tipe berbagai sistem pendorongan tergantung kepada jenis kapal selam tersebut diantaranya: Sistem diesel elektrik, *Air Independent Propulsion*, dan Nuklir. Selain itu juga pada kapal selam militer selalu dilengkapi dengan persenjataan seperti meriam kanon, torpedo, rudal penjelajah, rudal anti pesawat dan rudal anti kapal permukaan,

serta rudal balistik antar benua. Sistem Navigasi yang biasanya kapal selam menggunakan peralatan yang canggih dan modern antara lain: *Global Positioning System (GPS)*, *Inertial guidance*, *Sound Navigation and Ranging (Sonar)* dll.

Di jaman serba modern sekarang ini banyak sekali negara besar di dunia yang telah mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Kapal selam bertenaga nuklir ini umumnya akan mampu bergerak dengan lebih cepat dibandingkan kapal selam yang bertenaga diesel. Dikarenakan dalam reaktor nuklir ini akan mampu menghasilkan daya hingga mencapai 20 *megawatt*, kelebihan lainnya kapal selam yang bertenaga nuklir ini juga akan mampu mengekstrak secara mandiri oksigen dari air laut, serta menyerap karbon dioksida dalam kabin serta dapat menyelam secara terus menerus dengan menjaga kecepatan jelajah yang sangat stabil pada kisaran kecepatan 20-25 knot. Hal ini akan membuat kapal selam jenis nuklir cocok untuk beroperasi di lautan terbuka hingga samudera.

Kapal selam jenis pendorongan diesel elektrik biasanya didesain untuk dapat membawa persenjataan dan peralatan sama banyak dengan kapal selam berpendorong nuklir. Namun ketika kapal selam nuklir terbatas ukurannya akibat penempatan reaktor nuklir, kapal selam diesel elektrik ini mampu dirancang dengan ukuran lebih kecil dan tetap sama memamatkannya. Kelemahannya adalah kecepatan jelajah umumnya kapal selam jenis ini hanya berada di kisaran 10-15 knot dan kemampuan menyelam yang terbatas hingga beberapa minggu saja. Kapal jenis ini rata-rata hanya bisa menghasilkan daya 3 watt dari generator dieselnnya, namun karenanya jauh lebih senyap hingga sulit terdeteksi dan mampu bergerak lebih gesit. Kapal selam diesel elektrik mampu bergerak lincah dan senyap di perairan dangkal dan daerah berkepulauan. Tidak seperti reaktor nuklir yang tidak bisa dihidup matikan sekehendak hati dan terus mengeluarkan bunyi *humming* yang bisa mengekspos keberadaannya, kapal selam diesel elektrik hanya mengeluarkan bunyi yang minimal dan bisa *on-off* kapan saja. Dalam kondisi tertentu di perairan dangkal bisa saja kapal

selam diesel elektrik kini berbaring diam dengan mesin mati yang akan mempersulit upaya deteksi lawan. Kapal selam bertenaga nuklir dan kapal selam bertenaga diesel mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mana yang lebih baik diantara keduanya tergantung pada kebutuhan dan strategi militer masing-masing negara pengguna. Bagi Indonesia yang sebagian wilayah perairannya merupakan perairan dangkal dan mempunyai banyak *choke points* serta kepulauan, kemungkinan jenis kapal selam diesel elektrik adalah kapal selam yang sesuai untuk pertahanan wilayah perairan kita.

Tabel 1. 1 Kepemilikan kapal Selam Wilayah Asia

| No | Negara | Kapal selam yang ada | Rencana yang akan dipesan |
|----|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Australia | 6 | 12 |
| 2 | Indonesia | 4 | - |
| 3 | Malaysia | 2 | - |
| 4 | Singapura | 4 | 3 |
| 5 | Taiwan | 4 | 8 |
| 6 | Thailand | - | 3 |
| 7 | Vietnam | 6 | 4 |

Sumber: Globalfirepower (country-military-strength-2020)

Keterangan:

1. Australia 12 kapal selam baru yang direncanakan akan mulai menggantikan enam kapal selam saat ini di armadanya sampai tahun 2030.
2. Indonesia menambah tiga kapal selam pesanan tahun 2011 untuk dikirimkan pada tahun 2018 untuk memperkuat dua kapal selam yang ada.
3. Malaysia memiliki dua kapal selam kelas *Scorpene* namun telah tidak beroperasi sejak Maret 2015.

4. Singapura memiliki 4 buah kapal selam dan pada 2013 mengumumkan bahwa akan memesan tiga kapal selam baru untuk dikirim pada 2023 untuk diganti tiga kapal selam yang sudah tua.
5. Dua dari empat kapal selam Taiwan berusia sekitar 70 tahun dan hanya digunakan untuk pelatihan. Saat ini rencana untuk membangun hingga delapan kapal selam di dalam negeri setelah 13 tahun penundaan mendapatkan kapal selam berdasarkan perjanjian pertahanan 2001 dengan AS.
6. Thailand memiliki ambisi lama untuk memperoleh kapal selam. Pada Juli 2015, Thailand mengumumkan keputusan untuk membeli tiga kapal selam dari Cina. Namun, dua minggu kemudian keputusan itu ditunda.
7. Vietnam memiliki enam kapal selam dan empat sisanya akan dikirim pada 2026.

Meningkatnya eskalasi di kawasan Laut Cina Selatan, ditandai dengan banyaknya manuver kapal perang asing dari negara-negara besar maka tidak menutup kemungkinan bahwa Kapal Selam dari Negara asing akan turut serta dalam menunjukkan kekuatan perangnya. Di sisi lain bahwa Indonesia saat ini memiliki keterbatasan dalam kepemilikan kapal selam bila dihadapkan dengan ancaman yang ada. Kemampuan yang paling ideal pada sebuah kapal selam adalah *stealth* atau rahasia, beroperasi secara tertutup (*covert*) sampai dapat mendekati musuh, kemudian mengamati, melaporkan atau melaksanakan aksi manuver sesuai misi yang diembannya. Dengan posisi yang tepat dan *covert*, kapal selam mampu untuk menyerang musuh dengan cepat tanpa terdeteksi. Kapal selam juga mampu beroperasi sendiri tanpa dukungan dari satuan atau unsur lain. Dengan kemampuan inilah, kapal selam memberikan berbagai pilihan terhadap pemerintah Indonesia, khususnya untuk TNI AL dalam merencanakan pilihan atau *respons* dalam bentuk berbagai operasi militer.

TNI AL saat ini memiliki 4 kapal selam jenis U-209 dengan sistem propulsi diesel elektrik, dua KRI buatan Jerman tahun 1981 yaitu KRI Cakra/401 dan KRI Nanggala/402 (*on eternal patrol* pada 24 April 2021) sedangkan yang tiga lagi merupakan kerjasama *Transfer of Tehnologi* (TOT) antara Indonesia dan Korea Selatan dengan dibangunnya kapal selam di *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering* (DSME) dan PT. PAL antara lain KRI Nagapasa/403, KRI Ardadedali/404 dan KRI Alugoro 405. Hal ini adalah upaya untuk mendukung keamanan wilayah Indonesia. Dengan kapal selam yang dimiliki saat ini harus mampu menjadi daya tangkal terhadap potensi ancaman baik dari dalam maupun dari luar dan mampu beroperasi di seluruh perairan Indonesia yang berpotensi terjadi konflik kepentingan dan kedaulatan. Besarnya pengaruh dari daya tangkal ini tergantung pada kemampuan dan jumlah kapal selam yang dimiliki. Setiap Kapal selam diharapkan bisa beroperasi di seluruh perairan yang menjadi perhatian khusus dan area rawan, sehingga musuh akan berpikir lebih dalam meramu taktik anti kapal selam (AKS). Musuh juga memerlukan anggaran yang lebih besar dalam mengembangkan kemampuan untuk menangkali operasi kapal selam, baik teknologi AKS, kapal permukaan dan unsur AKS lainnya. Inilah yang menyebabkan mengapa kapal selam mempunyai kemampuan daya tangkal.

Teknologi kapal selam merupakan teknologi yang sangat sensitif dan bersifat eksklusif nasional. Sebagian besar negara produsen kapal selam tidak mau berbagi teknologi yang mereka punyai, walaupun dengan negara sahabat maupun sekutunya sekalipun. Dalam situasi ini, Indonesia mempunyai pilihan yang sulit. Politik bebas aktif dan pilihan non-blok menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kekuatan angkatan laut, khususnya kapal selam. Perusahaan galangan kapal domestik, seperti PT PAL, perlu mendapatkan bantuan dan dukungan teknologi kapal selam dari negara lain dalam mendesain, membangun, mengembangkan dan mempertahankan kemampuan kapal selam.

Dalam penjelasan lain, hal ini mengarah pada pembangunan postur TNI AL. Pembangunan postur tersebut pada dasarnya mencakup pada tingkat kemampuan, kekuatan, dan pola gelar kekuatan. Cakupan-cakupan ini mengarah pada peran TNI AL untuk menunjang kepentingan nasional Indonesia. Dalam perjalanannya, terjadi penyusunan ulang pada Komponen Utama yang tidak hanya mengacu pada ancaman saja melainkan kemampuan tertentu (*capacity based planning*), dalam konteks ini adalah TNI AL. Penyusunan ulang tersebut didorong oleh kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) yang dimulai pada tahun 2010 yang diproyeksikan selesai pada tahun 2024. Kebijakan MEF didasarkan pada empat kriteria, diantaranya adalah:

- a. Skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengenyampingkan ancaman potensial: *threat based design*.
- b. Kemampuan yang menjadi kemandirian: *capability based design*.
- c. Didasarkan pada anggaran ekonomi negara.
- d. Dapat terwujudnya efek penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat (*capacity building measures*).

Melihat idealisme ini, jika dihadapkan dengan kepentingan nasional untuk memiliki kekuatan laut dengan daya tangkal yang tinggi, maka pada dasarnya membangun postur pertahanan laut yang difokuskan pada TNI AL harus mengacu pada progres dari MEF itu sendiri. Perkembangan MEF sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2 MEF s.d 2024

| NO | URAIAN | KONDISI SEBELUM MEF | MEF-I 2010-2014 | | MEF-II 2015-2019 | | | | MEF-III 2020-2024 | | | | POSTUR IDEAL | | | | |
|----------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------|-------|--------------|---------|---------------|-----|----------|
| | | | JUMLAH | | JUMLAH | | JUMLAH | | JUMLAH | | RENC | CAPAI | s.d. MEF-III | CAPAI | s.d. MEF-III | JML | % (8/15) |
| | | | s.d. MEF-I | s.d. MEF-I (4/12) | RENC | CAPAI | s.d. MEF-II 11 Des 2018 (4+7) | s.d. MEF-II 11 Des 2018 (8/12) | RENC | CAPAI | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | TNI AD | | | 64,89% | | | | 74,62% | | | | | | | 49,33% | | |
| | a. Senjata Ringan | 92.155 | 613.043 | 84,73% | 129.417 | 36.019 | 649.062 | 89,70% | | | 723.564 | | | 783.462 | 82,85% | | |
| | b. Meriam / Roket / Rudal | 962 | 1.144 | 84,49% | 3.035 | 227 | 1.371 | 101,26% | | | 1.354 | | | 2.162 | 63,41% | | |
| | c. Ranpur | 1.321 | 1.641 | 43,90% | 730 | 359 | 2.000 | 53,50% | | | 3.738 | | | 4.858 | 41,17% | | |
| | d. Pesawat Terbang | 67 | 104 | 46,43% | 77 | 17 | 121 | 54,02% | | | 224 | | | 1.224 | 9,89% | | |
| 2 | TNI AL | | | 55,55% | | | | 68,72% | | | | | | | 45,47% | | |
| | a. KRI | 144 | 146 | 80,22% | 46 | 35 | 161 | 89,46% | | | 182 | | | 262 | 61,45% | | |
| | b. Kapal Selam | 2 | 2 | 25,00% | 3 | 2 | 4 | 50,00% | | | 8 | | | 12 | 33,33% | | |
| | c. Pesawat Udara | 62 | 72 | 72,00% | 16 | 13 | 85 | 85,00% | | | 100 | | | 160 | 53,13% | | |
| | d. Ranpur Marinir | 413 | 440 | 44,90% | 46 | 0 | 503 | 51,43% | | | 978 | | | 1.481 | 33,96% | | |
| 3 | TNI AU | | | 43,97% | | | | 44,40% | | | | | | | 32,64% | | |
| | a. Pesawat | 211 | 261 | 75,87% | 301 | 6 | 267 | 77,62% | | | 344 | | | 469 | 56,93% | | |
| | b. Radar | 17 | 20 | 62,50% | 27 | 0 | 20 | 62,50% | | | 32 | | | 32 | 62,50% | | |
| | c. Rudal | 0 | 0 | 0,00% | 18 | 0 | 0 | 0,00% | | | 72 | | | 96 | 0,00% | | |
| | d. PSU | 20 | 24 | 37,50% | 36 | 0 | 24 | 37,50% | | | 64 | | | 216 | 11,11% | | |
| | Prosentase | | 41,92% | 54,80% | | | | 62,58% | | | | | | | 42,48% | | |

Sumber : Fitri & Sanur, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa TNI AL pada poin kapal selam masih berada pada level paling bawah di antara tiga alutsista TNI AL lainnya, seperti KRI, Pesawat Udara, dan Kendaraan Tempur Marinir. Secara umum, tabel di atas menjelaskan bahwa pencapaian MEF dari Rencana Strategis (Renstra) I sampai III menjadi urutan dari pencapaian terbesar sampai yang terkecil sebagai berikut; AD, AL, dan AU.

Meski pun pada pencapaian MEF untuk Renstra kedua TNI AL berhasil sampai angka 68.72%, tetapi masih memiliki banyak tugas untuk diselesaikan, terkhususkan untuk Kapal Selam. Sedikitnya jumlah kapal selam yang dibandingkan dengan luas kedaulatan Negara Republik Indonesia menyebabkan kurangnya daya tangkal Indonesia terhadap ancaman-ancaman di depan.

Hal tersebut menjadi riskan dikarenakan bahwa negara yang memiliki keunggulan teknologi pertahanan baik secara kuantitas dan kualitas akan memiliki keunggulan yang lebih dalam tatanan regional dan global. Keunggulan tersebut bergantung lagi oleh kapabilitas suatu negara

dalam mengelola sumber daya nasionalnya yang kemudian terakumulasi pada kebijakan atau dalam lingkup industri pertahanan. Oleh karena itu, kemampuan teknologi dan industri pertahanan menjadi subjek kontrol politik yang kemudian memberikan pengaruh pada hubungan dengan pihak asing melalui ekspor dan transfer teknologi persenjataan untuk kepentingan pertahanan suatu negara. Konsekuensinya adalah, pada umumnya, suatu negara mengembangkan tugas kebijakan ini pada Kementerian Pertahanan sebagai *leading sector* dalam kebijakan pertahanan di lingkup industri pertahanan. Di Indonesia, permasalahan kebijakan untuk industri pertahanan berada di bawah Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Pembentukan KKIP didasari oleh refleksi kritis Indonesia dalam memandang embargo Amerika Serikat pada tahun 1995-2005. Sebabnya, diskursus pembangunan nasional untuk industri pertahanan diarahkan pada ide-ide kemandirian. Pada laporan *Military Balance* 2018, Indonesia sedang memaksimalkan pembangunan pertahanan yang difokuskan pada narasi Poros Maritim Dunia. Persebaran militer Indonesia sejak 2018 berfokus pada kawasan timur yang mengorganisir Komando Armada Ketiga dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Terhitung sejak 2018, Indonesia memiliki empat kapal selam, yaitu 2 buah Cakra Tipe 209/1300 dan 3 Naga pasa Tipe 209/1400.

Akan tetapi, secara umum data yang diakumulasi dari Ditjen Kuathan Kemhan di atas, jumlah kapal selam yang ada terhitung 8 buah. Kendati demikian, untuk dihadapkan pada ancaman yang berpotensi dan aktual nantinya, jumlah tersebut masih dianggap kurang. Dengan begitu, terdapat sebuah urgensi dalam konteks ini, yaitu maksimalisasi pembangunan kapal selam dalam bentuk kebijakan nasional.

Urgensi tersebut pada dasarnya tidak hanya sekedar menuju pada pembangunannya saja, tetapi bagaimana upaya maksimalisasi dan konsistensi dalam pembangunan *perse*. Hal itu dikarenakan kebijakan pembangunan yang, dalam konteks sini, difokuskan pada PT. PAL Indonesia ditujukan sebagai payung hukum dalam melakukan optimalisasi

pengembangannya. Lebih lanjut, kebijakan dari pemerintah Indonesia berguna untuk menjaga konsistensi pembangunan kapal selam yang diakumulasikan pada PT. PAL Indonesia. Dengan demikian, pembangunan kapal selam dalam payung hukum kebijakan pemerintah akan mengarah pada integrasi yang kuat untuk mencapai tujuan nasional dalam lingkup ini, yaitu meningkatkan daya tangkal.

Selain itu, urgensi lain juga ditemukan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk kepentingan pertahanan. Pada Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020, disebutkan pada bagian Sasaran Kebijakan nomor 10, poin B, Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.

Pada Keputusan Menteri Pertahanan tersebut disebutkan bahwa; Penguatan wilayah pertahanan laut dengan meningkatkan kekuatan kapal-kapal perang TNI AL yang meliputi: Kapal Frigate, Kapal Korvet, Kapal Cepat Rudal, Kapal Patroli yang dipersenjatai dengan peluru kendali minimal jarak 150 km, dan Kapal Selam yang dipersenjatai dengan rudal dan torpedo, serta peningkatan kemampuan fasilitas pangkalan-pangkalan.

Di saat bersamaan, disebutkan juga bahwa diperlukannya peningkatan daya guna industri pertahanan. Selain itu, pada bagian percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan juga mengandalkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Akumulasi dari urgensi di atas pada akhirnya mengarah pada suatu kebijakan utuh yang akan diformulasikan dalam kerangka kepentingan pertahanan, khususnya pada matra laut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam menciptakan daya tangkal yang sesuai porsi pada klasifikasi ancaman, baik aktual ataupun potensial, diperlukan sebuah keputusan politik dalam bentuk kebijakan pemerintah yang mampu mengorganisir elemen-elemen terkait.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengertian di atas, maka kemampuan operasional kapal selam yang dimiliki oleh TNI AL masih belum ideal dihadapkan luas laut Indonesia. Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kemampuan operasional kapal selam dalam meningkatkan daya tangkal sistem pertahanan negara antara lain:

1. Variabel sewaco pada kapal selam Indonesia masih menggunakan sonar pasif yang memiliki keterbatasan dalam menentukan jarak dan lokasi target sasaran. Dalam faktor senjata penggunaan torpedo saat ini memiliki beberapa kelemahan dalam akurasi dan jarak jangkauan target yang lebih jauh.
2. Variabel platform pada badan kapal selam yang cenderung lebih kecil dapat mempengaruhi akselerasi khususnya pada respon yang berlebihan serta kapasitas baterai kapal selam yang kecil dapat mempengaruhi ketahanan lama dalam operasi menyelam.
3. Variabel pangkalan mengalami keterbatasan pada ketersediaan fasilitas labuh, logistik dan pemeliharaan serta perawatan kapal selam di setiap pangkalan yang dapat mempengaruhi kemampuan operasional.

“Kemampuan Kapal Selam Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan negara khususnya di perairan Indonesia.”

1.2 Pembatasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tidak membahas tentang anggaran, yang meliputi harga kapal selam, anggaran operasional.
2. Tidak membahas tentang kebijakan pemerintah dalam kapal selam.

3. Tidak menganalisa jumlah serta kecakapan personil kapal selam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana pengaruh kemampuan operasional kapal selam guna memperkuat daya tangkal sistem pertahanan negara?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kemampuan kapal selam?
2. Bagaimana menganalisis hubungan faktor eksternal, internal dan kemampuan kapal selam terhadap daya tangkal sistem pertahanan negara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kemampuan kapal selam.
2. Menganalisis hubungan faktor eksternal, internal dan kemampuan kapal selam terhadap daya tangkal sistem pertahanan negara.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu teknologi pertahanan dan kaitannya dengan analisis operasional kapal selam di Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan diskusi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi kajian, acuan, serta rekomendasi bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam menentukan kebijakan terkait tataran pembangunan kekuatan pertahanan dan daya tangkal sistem pertahanan negara.